

Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Latihan Militer Multinasional Super Garuda Shield 2023

Delta Muhammad Ragil Wijaya^{a*}, Made Panji Teguh Santoso^b

^a Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

^b Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

^{1*} 2210631260030@student.unsika.ac.id; ² made.santoso@staff.unsika.ac.id

Abstract

This study examines Indonesia's defence diplomacy in the 2023 multinational military exercise Super Garuda Shield (SGS), conducted amid the strategic rivalry between the United States and China in the Indo-Pacific. This rivalry challenges Indonesia to uphold its independent and active foreign policy principles while enhancing its national defence capacity. The study employs a descriptive qualitative method using content analysis of official documents, press releases, and national and international media reports from the 2022–2023 period. The analytical framework applies defence diplomacy as the main lens and the Regional Security Complex Theory (RSCT) as the regional context. The findings reveal that SGS 2023, which involved 19 countries and more than 5,000 personnel, served dual functions: strengthening the Indonesian Armed Forces' capacity through interoperability and joint operations, and expanding Indonesia's multilateral defense networks. At the same time, the exercise reinforced Indonesia's independent position consistent with Indonesia's long-standing bebas-aktif (independent and active) foreign policy principle. This study contributes to the literature by framing SGS as a strategic soft power instrument of Indonesia's defence diplomacy.

Keywords: Super Garuda Shield, Indonesia, Indo-Pacific, Defence Diplomacy, Regional Security

1. Pendahuluan

Rivalitas strategis yang dijalankan antara Amerika dan Tiongkok semakin memanas di kawasan Indo-Pasifik. Persaingan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, politik, tetapi juga bidang keamanan dan pertahanan. Indo-Pasifik, sebagai kawasan yang strategis memiliki jalur perdagangan yang penting dan utama di dunia, titik-titik chokepoint maritim, dan menjadi panggung proyeksi kekuatan militer kedua negara besar tersebut. Bagi negara-negara yang ada di kawasan, rivalitas ini menimbulkan perasaan khawatir tentang keamanan, sekaligus juga memberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam bidang pertahanan agar situasi di wilayah tetap stabil.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan lokasi geografis yang penting di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik, memiliki peran yang penting untuk menjaga stabilitas maritim dan stabilitas kawasan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang mengharuskan tidak memihak kepada blok atau kekuatan tertentu, namun tetap berperan aktif dalam mendorong perdamaian dan kerja sama antarnegara. Dalam konteks pertahanan, prinsip ini diwujudkan melalui diplomasi pertahanan yang menekankan kerja sama militer nonkonfrontatif, pembangunan kapasitas, serta peningkatan kepercayaan antarnegara.

Latihan militer multinasional Super Garuda Shield (SGS) menjadi salah satu instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Super Garuda Shield ini awalnya merupakan latihan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, namun pada tahun 2022 berkembang menjadi latihan multinasional dengan melibatkan 14 negara dengan sekitar 4.000 personel. Latihan ini mencakup berbagai skenario, mulai dari operasi amfibi, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), hingga keamanan maritim. Transformasi tersebut menandai perluasan fungsi latihan sebagai wadah kerja sama pertahanan regional. Pada tahun 2023, partisipasi meningkat menjadi 19 negara dengan lebih 5.000 personel, menjadikan latihan militer terbesar sepanjang sejarah

penyelenggaraan. Selain itu, jenis latihan juga diperluas, mencakup pertahanan siber, latihan medis gabungan, operasi amfibi, keamanan maritim, dan operasi HADR. Negara peserta utama meliputi Amerika Serikat, Jepang, Australia, Singapura, Inggris, Prancis, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan beberapa negara dengan status sebagai pengamat. Hal ini menunjukkan peran SGS telah bertransformasi dari forum bilateral menjadi multilateral yang signifikan bagi kebijakan pertahanan dan diplomasi Indonesia.

Meskipun cara Indonesia menjalankan diplomasi pertahanan sudah mendapat perhatian dari kalangan akademik, seperti penelitian mengenai *hedging*, pembangunan kapasitas, dan peran latihan bersama, tetap saja studi yang secara khusus menggunakan SGS 2022–2023 sebagai contoh utama masih terbatas. Beberapa penelitian sudah membahas perkembangan diplomasi pertahanan Indonesia secara umum serta peran latihan militer dalam strategi *hedging*, tetapi tidak banyak yang secara rapi menghubungkan bukti-bukti empiris dari SGS terbaru, seperti perubahan skala, komposisi pesertanya, dan pesan politik yang tersembunyi, dengan kerangka teori yang menggabungkan diplomasi pertahanan dan dinamika kompleks keamanan regional. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana SGS digunakan sebagai alat dalam diplomasi pertahanan di tengah persaingan antara AS dan Tiongkok.

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada strategi *hedging* dan kebijakan pertahanan umum Indonesia, tanpa secara khusus menelaah SGS sebagai praktik konkret diplomasi pertahanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana SGS berfungsi sebagai instrumen *soft power* Indonesia di tengah rivalitas kekuatan besar

Berdasarkan problematika tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan inti: Bagaimana Super Garuda Shield 2023 digunakan sebagai instrumen diplomasi pertahanan oleh Indonesia dalam konteks rivalitas strategis Amerika Serikat–Tiongkok di Indo-Pasifik? Tujuan penelitian adalah menganalisis fungsi SGS 2023 dalam tiga aspek utama menurut kerangka *defense diplomacy*: (1) peningkatan kapasitas operasional dan interoperabilitas TNI; (2) mekanisme confidence-building measures (CBMs) antara Indonesia dan mitra; dan (3) posisi strategis Indonesia dalam arsitektur keamanan regional menurut *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Temuan diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual pada literatur diplomasi pertahanan serta rekomendasi kebijakan bagi pembuat keputusan Indonesia.

Diplomasi pertahanan merupakan salah satu konsep yang berkembang pesat dalam studi hubungan internasional pasca-Perang Dingin. Cottey dan Forster (2004) menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan merujuk pada pemanfaatan kapabilitas militer suatu negara untuk tujuan politik luar negeri melalui cara-cara non-koersif. Aktivitas tersebut mencakup latihan militer bersama, pertukaran personel militer, dialog strategis, kunjungan tingkat tinggi, kerja sama pendidikan militer, serta bantuan pertahanan. Konsep ini menandai pergeseran fungsi militer dari instrumen koersif menjadi instrumen *soft power* yang digunakan untuk memperkuat hubungan antarnegara dan membangun kepercayaan.

Secara teoretik, diplomasi pertahanan berkembang sebagai respons terhadap perubahan lanskap keamanan global yang semakin kompleks dan multidimensional. Ancaman transnasional seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan bencana kemanusiaan menuntut kerja sama pertahanan yang lebih intensif. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan menjadi mekanisme *preventive engagement* yang berfungsi meningkatkan transparansi, mengurangi risiko salah persepsi, dan memperkuat stabilitas kawasan melalui interaksi militer yang damai.

Nye (2004) menempatkan *soft power* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan. Dalam kerangka tersebut, militer dapat menjadi instrumen *soft power* apabila digunakan dalam konteks profesionalisme, transparansi, dan kerja sama internasional. Diplomasi pertahanan yang dilakukan melalui latihan bersama dan pendidikan militer dapat memperkuat citra negara serta meningkatkan kredibilitas angkatan bersenjata di mata negara lain.

Selain itu, diplomasi pertahanan memiliki fungsi strategis dalam pembangunan kapasitas pertahanan. Melalui latihan multinasional, negara seperti Indonesia memperoleh manfaat berupa peningkatan interoperabilitas, pemutakhiran doktrin, dan akses pada teknologi militer modern.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam memperkuat postur pertahanan di tengah dinamika Indo-Pasifik.

Indonesia memanfaatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas TNI sekaligus menjaga otonomi strategis. Berbagai studi menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mengedepankan kerja sama pertahanan yang bersifat inklusif, tidak mengikat, dan tetap menjaga prinsip non-aliansi (Laksmiana, 2021). Evolusi latihan Garuda Shield menjadi Super Garuda Shield (SGS) merupakan contoh konkret bagaimana Indonesia memperluas jejaring pertahanan sekaligus memperkuat perannya sebagai fasilitator keamanan regional.

Politik luar negeri bebas aktif telah menjadi pilar fundamental dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Secara historis, prinsip ini dirumuskan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terikat dalam rivalitas blok global, sekaligus tetap berperan aktif dalam menjamin perdamaian dunia. Sukma (1995) menegaskan bahwa prinsip bebas-aktif tidak identik dengan netralitas, melainkan fleksibilitas strategis yang memungkinkan Indonesia menentukan posisinya secara independen sesuai kepentingan nasional.

Dalam dinamika Indo-Pasifik kontemporer, prinsip bebas-aktif mengalami reinterpretasi sebagai *strategic autonomy*. Hal ini tercermin dari upaya Indonesia untuk menjaga hubungan konstruktif dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa terlibat dalam rivalitas geopolitik keduanya. Laksmiana (2021) menyebut strategi ini sebagai *hedging*, yakni upaya menyeimbangkan kepentingan melalui kombinasi kerja sama, pembatasan risiko, dan penciptaan ruang otonomi diplomatik. Prinsip bebas-aktif tercermin jelas dalam pelaksanaan SGS. Indonesia mampu mengelola latihan multinasional ini tanpa memberi kesan bahwa Indonesia berpihak pada blok tertentu. Pendekatan inklusif yang diambil Indonesia melalui diplomasi pertahanan konsisten dengan pendekatan keamanan kooperatif dan menjaga stabilitas kawasan tanpa memperkuat polarisasi.

Regional Security Complex Theory (RSCT), sebagaimana dijelaskan Buzan dan Wæver (2003), menyatakan bahwa keamanan internasional sebagian besar terbentuk oleh interaksi antarnegara dalam suatu kawasan. Kawasan tersebut memiliki pola ancaman, kepentingan strategis, dan interdependensi yang saling terkait. Kompleks keamanan regional dibentuk oleh hubungan kedekatan geografis, intensitas ancaman, dan dinamika politik yang saling mempengaruhi.

Indo-Pasifik merupakan salah satu kawasan dengan tingkat interdependensi keamanan tertinggi di dunia. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi faktor utama yang membentuk dinamika keamanan regional. Rivalitas ini melahirkan tekanan geopolitik bagi negara-negara menengah seperti Indonesia untuk menyesuaikan strategi keamanan dan kebijakan luar negeri agar tetap menjaga otonomi strategis di tengah kompetisi dua kekuatan besar.

Dalam kerangka RSCT, negara-negara menengah memiliki peran penting sebagai penyeimbang stabilitas kawasan. Mereka bukan aktor dominan, tetapi memiliki kapasitas untuk mempengaruhi dinamika keamanan melalui mekanisme diplomasi dan kerja sama multilateral. Latihan militer multinasional seperti SGS dapat dipahami sebagai instrumen penciptaan interdependensi keamanan. Latihan ini mendorong transparansi militer, mengurangi risiko dilema keamanan, dan meningkatkan komunikasi antaraktornya. Melalui SGS, Indonesia berperan sebagai fasilitator stabilitas di Indo-Pasifik dengan mengembangkan mekanisme kerja sama yang inklusif dan tidak berorientasi pada blok tertentu.

Latihan militer multinasional memiliki fungsi penting dalam meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan operasional angkatan bersenjata. Melalui latihan bersama, negara-negara peserta dapat melakukan pertukaran doktrin, teknik, dan teknologi yang mendukung peningkatan kualitas operasional militer. Dalam ranah diplomasi pertahanan, latihan multinasional juga berfungsi sebagai *strategic signalling*. Negara dapat menyampaikan komitmen politik terhadap stabilitas kawasan tanpa melakukan tindakan koersif. SGS merupakan contoh bagaimana Indonesia memperkuat kredibilitas strategisnya melalui kerja sama multinasional yang bersifat non-aliansi. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa latihan multinasional dapat memperkuat keamanan kooperatif dengan membuka ruang dialog dan kolaborasi. Dalam konteks Indo-Pasifik, SGS menjadi platform yang relevan untuk menjaga stabilitas kawasan melalui keterlibatan

inklusif berbagai negara. Pendekatan ini konsisten dengan AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) yang menekankan inklusivitas, kerja sama, dan penolakan terhadap polarisasi kawasan..

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran latihan militer multinasional *Super Garuda Shield* (SGS) 2023 sebagai instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam mengenai proses, konteks, dan makna di balik praktik kebijakan luar negeri, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka. Menurut Cresswell (2018), metode penelitian ini sangat tepat digunakan dalam penelitian yang berfokus pada dinamika sosial dan politik, karena menekankan interpretasi terhadap makna daripada sekedar perhitungan statistik.

Fokus penelitian diarahkan pada periode 2022–2023, yaitu sejak *Garuda Shield* berkembang menjadi latihan multinasional hingga penyelenggaraan SGS 2023 yang melibatkan 19 negara dengan lebih dari 5.000 personel. Periode ini penting karena memperlihatkan transformasi SGS dari forum bilateral Indonesia–Amerika Serikat menjadi ajang multilateral yang memperkuat jejaring pertahanan Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber utama. Pertama, dokumen resmi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait perencanaan dan pelaksanaan SGS. Kedua, siaran pers dan laporan dari *US Indo-Pacific Command* yang memberikan informasi mengenai jumlah negara peserta, skala latihan, dan bentuk kerja sama pertahanan yang dilaksanakan. Ketiga, pemberitaan dari media nasional seperti *Kompas* dan *The Jakarta Post* serta media internasional seperti *The Diplomat* yang melaporkan secara detail mengenai kegiatan SGS 2022–2023. Keempat, artikel jurnal akademik mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dan dinamika keamanan Indo-Pasifik yang memberikan landasan teoritis bagi analisis.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi dipahami sebagai teknik penelitian sistematis yang bertujuan mengidentifikasi pola, kategori, dan makna dari teks maupun dokumen (Krippendorff, 2018). Proses analisis dilakukan melalui tahapan: (1) pengumpulan teks yang relevan; (2) kategorisasi data sesuai dimensi kerangka teori; (3) interpretasi terhadap temuan berdasarkan konteks diplomasi pertahanan Indonesia. Tiga kategori utama ditetapkan, yaitu: *capacity building* (peningkatan kapasitas TNI melalui interoperabilitas, latihan amfibi, keamanan maritim, pertahanan siber, dan penanggulangan bencana), *confidence-building measures* (pembentukan kepercayaan antaraktor melalui keterlibatan multinasional, transparansi, dan dialog pertahanan), dan *multilateral cooperation* (perluasan jejaring pertahanan melalui keterlibatan negara mitra dan pengamat dalam SGS).

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan prosedur validasi dengan cara membandingkan sumber dari berbagai tempat dan membatasi periode pengumpulan data antara tahun 2022 hingga 2023. Proses triangulasi dilakukan dengan melibatkan tiga jenis sumber utama, yaitu (1) sumber resmi dari pemerintah dan militer seperti Kementerian Pertahanan RI dan *US Indo-Pacific Command*, (2) laporan dari media yang dapat dipercaya seperti *The Diplomat* dan *The Jakarta Post*, serta (3) publikasi akademik dan kebijakan seperti *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* dan jurnal *International Affairs*. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghindari bias dalam interpretasi dan memastikan hasil penelitian mencerminkan secara lengkap dinamika penyelenggaraan Super Garuda Shield (SGS) 2022–2023.

Dengan desain penelitian ini, SGS diposisikan bukan hanya sebagai latihan militer teknis, melainkan juga sebagai instrumen diplomasi pertahanan. Analisis diarahkan pada bagaimana latihan tersebut mencerminkan fungsi *defense diplomacy* Indonesia dan bagaimana posisinya dipengaruhi oleh dinamika regional yang digambarkan oleh *Regional Security Complex Theory*. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk menilai SGS dari dua dimensi sekaligus: fungsi praktisnya sebagai sarana pembangunan kapasitas pertahanan dan maknanya sebagai instrumen diplomasi dalam konteks rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok di Indo-Pasifik.

3. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil dan analisis terkait diplomasi pertahanan Indonesia yang ditunjukkan melalui pelaksanaan latihan Super Garuda Shield (SGS) di tahun 2022 hingga 2023. SGS dipilih karena merupakan salah satu latihan militer multinasional terbesar yang berlangsung di Indonesia, dan menunjukkan evolusi strategi pertahanan dari fokus bilateral ke arah multilateral. Transformasi dalam skala latihan ini memiliki implikasi tak hanya dari sisi teknis militer, tetapi juga dalam aspek diplomatik yang signifikan, terutama dalam memperluas ikatan kerja sama pertahanan Indonesia di konteks persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sejak awal, diplomasi pertahanan telah dilihat sebagai sebuah alat dalam kebijakan luar negeri yang bersifat non-konfrontatif, di mana penggunaan kekuatan militer tidak ditunjukkan untuk berperang, melainkan untuk membangun kepercayaan dan memperkokoh kerja sama internasional (Cotter & Forster, 2004). Dalam hal ini, SGS berfungsi sebagai medium untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengumpulkan negara-negara dari berbagai belahan dunia, termasuk mitra lama Amerika Serikat di Asia Pasifik serta beberapa negara Eropa. Dengan demikian, SGS tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kemampuan teknis Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai negara yang bertindak dengan prinsip bebas-aktif.

Dari perspektif empiris, terdapat perbedaan mencolok antara SGS 2022 dan SGS 2023. Pada tahun 2022, latihan militer tersebut dihadiri oleh 14 negara dengan sekitar 4.000 personel, sementara pada tahun 2023, partisipasi melonjak menjadi 19 negara dengan lebih dari 5.000 personel (US Indo-Pacific Command, 2022; US Indo-Pacific Command, 2023). Latihan yang dilakukan juga semakin rumit, mencakup operasi amfibi, keamanan laut/maritim, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta penguatan pertahanan siber. Pertambahan jumlah peserta dan luasnya cakupan latihan menunjukkan bahwa SGS telah bergeser dari sekadar forum bilateral menjadi alat diplomasi pertahanan multilateral yang signifikan bagi Indonesia.

Dalam perspektif teori Regional Security Complex Theory (RSCT), perubahan ini dapat diartikan sebagai cerminan dari dinamika keamanan di Indo-Pasifik yang sangat dipengaruhi oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Buzan & Wæver, 2003). Persaingan ini menimbulkan dilema strategis bagi negara-negara menengah seperti Indonesia: bagaimana menjaga hubungan baik dengan kekuatan besar tanpa mengorbankan otonomi dalam kebijakan luar negerinya. Dengan pelaksanaan SGS, Indonesia berusaha untuk berperan sebagai pengantar kerja sama pertahanan multilateral tanpa memihak secara eksklusif, sambil juga meningkatkan kapasitas pertahanan domestiknya melalui interaksi dengan beragam mitra internasional.

Dengan demikian, SGS memiliki makna penting tidak hanya sebagai latihan militer, tetapi juga sebagai platform untuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam memastikan stabilitas di kawasan. Bagian berikutnya dari hasil dan pembahasan ini akan menjelaskan lebih jauh dalam empat subbab: (1) Signifikansi Diplomasi SGS 2023, (2) Penguatan Kapasitas dan Interoperabilitas, (3) Daya Tawar Indonesia dan Prinsip Bebas-Aktif, serta (4) *Regional Security Complex Theory (RSCT)*. Keempat subbab ini disusun untuk memaparkan bagaimana SGS 2023 berfungsi ganda sebagai instrumen *soft power* serta strategi dalam menanggapi konfigurasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Diplomatic Significance of SGS 2023

Latihan militer Super Garuda Shield (SGS) 2023 menjadi salah satu kegiatan pertahanan multinasional terbesar yang pernah diadakan di Indonesia. Sebelumnya, Garuda Shield hanya berlangsung secara bilateral, melibatkan Indonesia dan Amerika Serikat, namun sejak tahun 2022, kegiatan ini telah berubah menjadi multinasional dengan keikutsertaan dari 14 negara dan sekitar 4.000 personel (*US Indo-Pacific Command, 2022*). Kemajuan ini semakin terasa pada tahun 2023 ketika jumlah peserta meningkat menjadi 19 negara dengan lebih dari 5.000 personel (*US Indo-Pacific Command, 2023*).

Tabel 1. Perbandingan SGS 2022-2023

Aspek	SGS 2022	SGS 2023	Keterangan/Manfaat bagi Indonesia (TNI)
Jumlah Negara Peserta	14 negara: Indonesia, AS, Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Inggris, dan beberapa negara pengamat.	19 negara: Indonesia, AS, Jepang, Australia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, Inggris, Prancis, Kanada, Timor Leste, dan Papua Nugini.	Meningkatnya partisipasi menunjukkan kepercayaan regional terhadap Indonesia sebagai fasilitator kerja sama pertahanan multilateral.
Jumlah Personel	± 4.000 personel (US Indo-Pacific Command, 2022).	± 5.000 personel (US Indo-Pacific Command, 2023).	Menunjukkan perluasan kapasitas latihan dan peningkatan interaksi antar-angkatan bersenjata.
Jenis Latihan Utama	Operasi amfibi, keamanan maritim, latihan menembak gabungan, penanggulangan bencana (<i>HADR</i>).	Operasi amfibi, keamanan maritim, pertahanan siber, operasi medis gabungan, <i>combined arms live-fire exercise, HADR</i> .	Variasi latihan yang lebih kompleks memperkuat kemampuan TNI menghadapi ancaman non-tradisional dan situasi gabungan.
Fokus Diplomasi Pertahanan	Transformasi dari latihan bilateral menjadi multinasional.	Penguatan diplomasi pertahanan multilateral dan citra Indonesia sebagai aktor <i>soft power</i> .	Meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis non-aliansi di Indo-Pasifik.

Sumber: US Indo-Pacific Command (2022, 2023); *The Diplomat* (2023); *The Jakarta Post* (2023).

Negara-negara yang turut berpartisipasi berasal tidak hanya dari kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dari Asia Timur, Oseania, Amerika Utara, dan Eropa. Peningkatan skala partisipasi ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah dan juga sebagai aktor signifikan dalam memperkuat kerjasama pertahanan multilateral.

Dari perspektif diplomasi, SGS 2023 menekankan posisi Indonesia sebagai penghubung kerjasama keamanan di tingkat regional. Dengan mengumpulkan 19 negara dalam satu forum latihan militer, Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam menengahi berbagai kepentingan di antara negara-negara yang memiliki orientasi strategis yang berbeda. Keikutsertaan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia di satu sisi, serta negara-negara Asia Tenggara dan mitra lainnya di sisi lain, mencerminkan bagaimana Indonesia dapat mengelola hubungan pertahanan tanpa terikat pada satu blok militer tertentu. Ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang menuntut Indonesia tetap mandiri dalam menentukan kebijakan luar negeri, namun tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas di kawasan.

Lebih lanjut, SGS 2023 memiliki makna simbolis yang kuat. Latihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan saling operasi antarmiliter, tetapi juga berfungsi sebagai alat diplomasi pertahanan yang bersifat damai. Dengan memperluas jenis latihan termasuk operasi amfibi, bantuan kemanusiaan, keamanan maritim, hingga pertahanan siber, Indonesia menyampaikan bahwa kerja sama pertahanan tidak hanya fokus pada aspek militer yang keras, tetapi juga pada isu-isu keamanan non-tradisional yang semakin relevan. Pesan ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang mendukung langkah-langkah untuk membangun kepercayaan melalui diplomasi pertahanan, alih-alih konfrontasi militer.

Pendekatan diplomasi pertahanan Indonesia memang menekankan pada peningkatan kapasitas dan pembangunan kepercayaan, bukan sekadar aliansi atau penggunaan kekuatan militer secara koersif. Temuan ini selaras dengan pendapat Cottey dan Forster (2004) yang menyatakan bahwa diplomasi pertahanan berperan sebagai alat untuk membangun kepercayaan

antarnegara yang memiliki kepentingan strategis berbeda. Dalam konteks ini, SGS menunjukkan cara Indonesia menggunakan kerja sama militer bersama negara-negara lain untuk meningkatkan kepercayaan, memperluas komunikasi strategis, dan memperkuat kestabilan wilayah tanpa perlu terlibat dalam aliansi militer resmi.

Keterlibatan banyak negara dalam SGS 2023 juga menunjukkan bagaimana Indonesia memanfaatkan latihan militer sebagai cara untuk memperkuat jaringan diplomasi pertahanan. Negara-negara yang berpartisipasi, seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Kanada, dan Prancis, adalah mitra strategis penting di wilayah Indo-Pasifik. Kehadiran mereka dalam SGS bukan hanya memperluas jaringan kerjasama Indonesia, tetapi juga menambah legitimasi Indonesia sebagai aktor yang dapat memulai format kerja sama yang inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan Laksmana (2021) yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di Indo-Pasifik cenderung bersifat menyeimbangkan, yaitu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa secara terbuka berpihak pada salah satu dari kedua kekuatan tersebut. Melalui SGS, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk memperkuat relasi dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat tanpa secara eksplisit mengabaikan prinsip otonomi strategis.

Akhirnya, makna diplomatik SGS 2023 juga tercermin dari kontribusinya terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Keberadaan banyak negara dalam satu forum latihan multinasional menciptakan ruang untuk dialog, interaksi, dan kepercayaan yang lebih luas antara para aktor kunci di kawasan. Ini menjadi hal yang sangat penting di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang kerap menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya blok-blok militer yang rigid di kawasan. Dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan kerja sama, Indonesia memposisikan SGS sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan regional dan mencegah eksklusivitas dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Dengan demikian, SGS tidak hanya memiliki dimensi militer, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi diplomasi Indonesia dalam menjaga keseimbangan regional.

Capacity Building and Interoperability

Salah satu manfaat utama *Super Garuda Shield* (SGS) 2023 bagi Indonesia adalah peningkatan penguatan kapasitas dan interoperabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan angkatan bersenjata negara lain. Latihan ini menyediakan ruang bagi TNI untuk mengembangkan kemampuan teknis dalam operasi gabungan, baik di darat, laut, maupun udara. Menurut laporan resmi US Indo-Pacific Command, SGS 2023 melibatkan skenario kompleks seperti operasi amfibi, keamanan maritim, latihan menembak gabungan, operasi medis, pertahanan siber, dan penanggulangan bencana (US Indo-Pacific Command, 2023). Melalui keterlibatan dalam skenario ini, TNI memperoleh pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan operasional modern yang tidak bisa diatasi secara unilateral.

Dari sisi teknis, SGS 2023 memungkinkan TNI untuk meningkatkan interoperabilitas dengan mitra internasional. Konsep interoperabilitas ini penting karena latihan multinasional tidak hanya menekankan pada kemampuan tempur, tetapi juga pada koordinasi, komunikasi, dan penggunaan standar operasi bersama. Partisipasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Inggris membuka peluang transfer pengetahuan, baik dalam penggunaan teknologi militer modern maupun dalam prosedur operasi gabungan. Bagi TNI, hal ini mempercepat proses adaptasi terhadap standar operasional internasional yang akan sangat berguna bila Indonesia terlibat dalam operasi multilateral, baik untuk misi perdamaian PBB maupun untuk operasi bantuan kemanusiaan regional. Rincian manfaat teknis SGS 2023 terhadap penguatan kapasitas TNI dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Dampak Latihan Super Garuda Shield 2023 terhadap Kapasitas TNI

Aspek Latihan	Bentuk Kegiatan	Manfaat Teknis bagi TNI	Manfaat Strategis bagi Diplomasi Pertahanan
Operasi Amfibi	<i>Amphibious landing</i> bersama AS, Jepang, dan Australia	Peningkatan koordinasi lintas-matra dan	Meningkatkan kredibilitas TNI dalam operasi multinasional

Aspek Latihan	Bentuk Kegiatan	Manfaat Teknis bagi TNI	Manfaat Strategis bagi Diplomasi Pertahanan
		kemampuan serangan pantai	
Keamanan Maritim	Latihan patroli bersama dan komunikasi taktis	Penguasaan komunikasi laut dan pengendalian pergerakan kapal	Meningkatkan kepercayaan dalam forum kerja sama maritim regional
Pertahanan Siber	<i>Cyber defense simulation</i>	Penguatan kemampuan pertahanan digital dan deteksi ancaman siber	Memperluas ruang diplomasi pertahanan di sektor keamanan non-tradisional
Operasi Medis Gabungan	<i>Joint medical response and evacuation</i>	Peningkatan koordinasi logistik dan bantuan kemanusiaan	Meningkatkan citra Indonesia sebagai negara kontributor perdamaian
HADR (Bencana)	Simulasi penanggulangan bencana bersama	Integrasi sistem komando dan kontrol bencana	Memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia

Sumber: US Indo-Pacific Command (2023); TNI Portal PPID (2023); *The Diplomat* (2023); *ANTARA Jatim* (2023).

Selain meningkatkan keterampilan teknis, SGS 2023 juga berkontribusi pada penguatan kapasitas strategis TNI. Melalui latihan ini, TNI tidak hanya belajar tentang aspek taktis seperti latihan menembak atau operasi gabungan, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang koordinasi strategis multinasional, termasuk bagaimana mengintegrasikan kekuatan militer dari negara dengan latar belakang berbeda ke dalam satu kerangka kerja sama. Hal ini penting karena ancaman kontemporer seperti bencana alam, serangan siber, dan krisis kemanusiaan sering kali memerlukan respons kolektif. Dengan terlibat dalam SGS, TNI memperluas wawasannya tentang dinamika keamanan non-tradisional sekaligus memperkuat kapasitas nasional untuk merespons krisis.

SGS juga berfungsi sebagai laboratorium diplomasi pertahanan, di mana TNI dapat memperluas jaringan pertahanan dengan militer negara lain. Pertemuan rutin dalam kerangka latihan ini memperkuat *confidence building measures* melalui interaksi personal antarperwira, yang pada gilirannya menciptakan fondasi kepercayaan jangka panjang. Misalnya, dalam SGS 2023, TNI bekerja sama dengan US Army Pacific serta pasukan Jepang dan Australia dalam latihan gabungan yang melibatkan peralatan modern, termasuk sistem komunikasi canggih dan wahana taktis. Keikutsertaan dalam latihan semacam ini memperkuat profesionalisme TNI sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam menjalin kerja sama pertahanan regional. Temuan ini mendukung pendapat Buzan dan Wæver (2003) dalam teori Kompleks Keamanan Regional (RSCT) bahwa meningkatkan kemampuan militer dan kerja sama antarpasukan bersenjata di suatu wilayah penting dalam membangun kepercayaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Dalam situasi ini, SGS tidak hanya bertindak sebagai latihan militer, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ketergantungan keamanan regional melalui kerja sama diplomatik di bidang pertahanan.

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas TNI melalui SGS memiliki implikasi strategis terhadap posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara dengan prinsip bebas-aktif, Indonesia tidak bergabung dalam aliansi militer mana pun, sehingga membangun kapasitas pertahanan nasional melalui kerja sama multinasional menjadi opsi strategis yang realistis. SGS memberi kesempatan bagi TNI untuk memperkuat kemampuannya tanpa harus terikat pada komitmen aliansi formal. Dengan demikian, *capacity building* dan *interoperability* yang diperoleh melalui SGS tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis TNI, tetapi juga memperkuat posisi diplomasi pertahanan Indonesia sebagai aktor yang kredibel dan independen di kawasan.

Indonesia's Bargaining Power and Bebas Aktif Principle

Salah satu aspek krusial dari pelaksanaan SGS 2023 adalah bagaimana latihan itu bisa memperkuat *bargaining power* Indonesia dalam dinamika keamanan regional dan global. Sebagai negara tidak berpihak di wilayah Indo-Pasifik, Indonesia tidak terikat secara resmi dengan blok keamanan mana pun, baik dengan Amerika Serikat maupun Cina. Namun, melalui SGS, Indonesia berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai aktor utama dan terpercaya dalam memfasilitasi kolaborasi multinasional. Keterlibatan 19 negara dalam SGS 2023 menunjukkan penghargaan terhadap posisi strategis Indonesia sebagai negara yang mampu menghubungkan kepentingan berbagai pihak di tengah persaingan geopolitik. Ini memperkuat posisi negosiasi Indonesia dalam forum regional seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)* dan *East Asia Summit (EAS)*.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menjadi landasan diplomasi Indonesia sejak tahun 1948, jelas terlihat dalam pelaksanaan SGS. Prinsip "bebas" ditunjukkan melalui kebijakan Indonesia yang tidak condong kepada blok militer mana pun, sedangkan prinsip "aktif" tampak dalam usaha Indonesia untuk terlibat secara langsung dalam membangun perdamaian dan stabilitas kawasan lewat kerja sama pertahanan. Dalam konteks SGS, Indonesia tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penyusun agenda yang mendorong kerja sama inklusif yang didasarkan pada kepercayaan dan pengembangan kapasitas. Oleh karena itu, SGS bukan hanya latihan militer, tetapi juga alat politik luar negeri untuk menegaskan kedudukan Indonesia sebagai negara yang mandiri tetapi kooperatif dalam kerangka keamanan regional.

Dari sudut pandang diplomasi pertahanan, SGS berperan sebagai instrumen daya tarik halus Indonesia. Menurut Cottey dan Forster (2004), diplomasi pertahanan adalah pemanfaatan sumber daya militer untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tanpa adanya paksaan. Dalam konteks ini, Indonesia memanfaatkan SGS untuk meningkatkan citra sebagai negara yang berdedikasi pada kerja sama yang damai. Kehadiran negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia bukanlah untuk membentuk aliansi, melainkan sebagai forum dialog militer terbuka yang meningkatkan kepercayaan timbal balik dan interoperabilitas tanpa mengancam pihak lain, termasuk Tiongkok.

Secara praktis, SGS memperkuat posisi diplomasi pertahanan Indonesia di hadapan mitra global. Contohnya, lewat latihan bersama itu, TNI mendapatkan peluang untuk berinteraksi secara strategis dengan pejabat militer dari Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Rapat seperti ini memberikan kesempatan untuk berbagi pemikiran tentang keamanan laut, kolaborasi operasi, serta penanganan ancaman nonkonvensional seperti bencana alam dan serangan siber. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan keahlian teknisnya, tetapi juga mengupayakan kepentingan nasionalnya melalui diplomasi pertahanan yang berlandaskan kerja sama dan kepercayaan. Hasilnya adalah peningkatan relevansi strategis Indonesia di hadapan kekuatan besar, tanpa mengorbankan prinsip kemandirian.

Pelaksanaan SGS 2023 juga menunjukkan keseimbangan strategis Indonesia dalam menghadapi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Di satu sisi, Indonesia meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui latihan SGS, sementara di sisi lain, Indonesia tetap membangun hubungan positif dengan Tiongkok melalui mekanisme lain seperti China-ASEAN Defence Dialogue dan kolaborasi ekonomi strategis. Pendekatan ini menggambarkan kemampuan Indonesia untuk berperan sebagai penyeimbang yang menjaga stabilitas kawasan tanpa mengambil sisi tertentu. Strategi semacam ini sejalan dengan ide diplomasi kekuatan menengah, di mana negara-negara menengah memanfaatkan gabungan pengaruh lembut dan keamanan kooperatif untuk memengaruhi dinamika regional tanpa konflik (Buzan & Wæver, 2003). Temuan ini memperkuat konsep *defense diplomacy* sebagaimana dijelaskan oleh (Cottey dan Forster, 2004), yang menekankan bahwa kerja sama militer multinasional dapat berfungsi sebagai instrumen *confidence-building* untuk memperkuat hubungan antarnegara tanpa paksaan militer. Dalam konteks ini, SGS menjadi wujud nyata penerapan diplomasi pertahanan Indonesia dalam membangun kepercayaan strategis dan mengelola stabilitas kawasan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Buzan dan Wæver (2003) dalam kerangka *Regional Security Complex Theory (RSCT)*, di mana keamanan kawasan

bergantung pada kemampuan negara-negara untuk membangun keterhubungan dan kerja sama yang saling memperkuat melalui mekanisme nonkonfrontatif seperti SGS.

Lebih jauh, prinsip bebas-aktif juga tampak dalam kebijakan komunikasi publik Indonesia mengenai SGS. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan dan TNI, secara terus-menerus menekankan bahwa latihan ini tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan memperluas jaringan kolaborasi. Pernyataan ini menegaskan peran SGS sebagai alat diplomasi pertahanan yang inklusif. Dengan berperan sebagai fasilitator kolaborasi, Indonesia memperlihatkan kepada dunia bahwa diplomasi pertahanan bisa menjadi alat untuk perdamaian dan stabilitas, bukan persaingan kekuatan.

Dari seluruh dinamika ini, bisa disimpulkan bahwa Super Garuda Shield meningkatkan bargaining power Indonesia di dua tingkatan sekaligus: (1) tingkatkan teknis, lewat peningkatan kapasitas dan interoperabilitas TNI; dan (2) tingkat diplomatik, melalui peningkatan kredibilitas dan kepercayaan dari mitra internasional. Penerapan prinsip bebas-aktif secara konsisten memungkinkan Indonesia untuk berperan signifikan di tengah persaingan antara kekuatan besar, tanpa mengorbankan kemandirian kebijakan luar negerinya. Dengan begitu, SGS menjadi contoh nyata bagaimana diplomasi pertahanan dapat berperan sebagai alat untuk memperkuat kekuatan nasional dan memperluas pengaruh regional melalui pendekatan yang damai dan konstruktif.

Regional Security Complex Context

Dalam konteks Teori Kompleks Keamanan Regional (RSCT), keamanan internasional dianggap sebagai hasil interaksi antarnegara di level regional. Setiap wilayah memiliki dinamika keamanan unik yang dipengaruhi oleh sejarah, geografi, dan kepentingan strategis negara-negara yang terdapat di dalamnya (Buzan & Wæver, 2003). Indo-Pasifik adalah contoh konkret dari kompleks keamanan regional yang tengah berkembang, di mana persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi pusat utama yang memengaruhi hubungan keamanan antarnegara di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Super Garuda Shield (SGS) 2023 dapat dipahami sebagai alat strategis Indonesia untuk menghadapi kompleksitas keamanan regional tanpa terjebak dalam persaingan dua kekuatan besar tersebut.

Sejak dicanangkan pada tahun 2022 sebagai latihan internasional, SGS menunjukkan perkembangan penting dalam cara pandang keamanan regional. Latihan ini melibatkan 19 negara dengan beragam latar belakang politik dan militer, mulai dari sekutu erat Amerika Serikat (seperti Jepang dan Australia) hingga mitra netral di Asia Tenggara. Keterlibatan berbagai aktor ini mencerminkan bahwa SGS bukan hanya alat militer semata, melainkan sebuah forum keamanan yang bersifat inklusif dan kolaboratif. Dengan melibatkan negara-negara non-aliansi seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste, Indonesia berusaha membentuk ruang keamanan kawasan yang tidak dikuasai oleh kekuatan tunggal. Ini menegaskan peran Indonesia sebagai aktor yang menstabilkan kompleks keamanan regional Indo-Pasifik.

Dalam konteks persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, SGS berperan sebagai diplomasi penyangga, yaitu cara yang memungkinkan Indonesia mempertahankan keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan dominan tersebut. Amerika Serikat mendukung SGS untuk menguatkan jaringan kemitraan pertahanan Indo-Pasifik, sedangkan Tiongkok menilai aktivitas ini secara cermat karena khawatir tentang dampak geopolitiknya. Namun, pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa SGS tidak dimaksudkan untuk melawan pihak tertentu, melainkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan kolaborasi keamanan multilateral (US Indo-Pacific Command, 2023). Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip *hedging*, yaitu strategi untuk memelihara hubungan positif dengan semua pihak tanpa harus memihak.

RSCT menyatakan bahwa negara-negara di suatu kawasan memiliki keterkaitan keamanan yang signifikan, sehingga perubahan dalam kebijakan pertahanan satu negara dapat berdampak pada stabilitas negara lainnya. SGS menjadi bukti nyata dari fenomena ini, karena memperkuat saling ketergantungan keamanan di antara negara-negara yang mengikuti latihan militer. Dengan kegiatan seperti latihan tembak langsung gabungan dan operasi keamanan maritim, negara-negara yang terlibat membangun kepercayaan serta meningkatkan transparansi dalam bidang militer. Tahapan ini sangat krusial di wilayah yang sering kali dipenuhi

ketidakpercayaan strategis. Dengan cara ini, SGS berkontribusi mengurangi risiko dilema keamanan yang merupakan salah satu penyebab ketegangan di Indo-Pasifik

Selain itu, SGS mendukung konsep keamanan kooperatif yang menjadi pendekatan utama ASEAN dalam mempertahankan stabilitas kawasan. Lewat latihan bersama ini, Indonesia bisa membuktikan bahwa diplomasi pertahanan bisa jadi alat untuk meningkatkan kepercayaan, bukan persaingan. Pendekatan ini sejalan dengan visi “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” (AOIP) yang menekankan kolaborasi, keterlibatan, dan diskusi sebagai fondasi stabilitas regional. Dengan menjadikan SGS sebagai wadah kerja sama yang terbuka, Indonesia menginterpretasikan kembali prinsip AOIP dalam langkah nyata, menjadikan pertahanan sebagai sarana integrasi regional, bukan pemecahan geopolitik.

Lebih lanjut, SGS juga menunjukkan bagaimana kompleks keamanan regional Indo-Pasifik saat ini tengah mengalami proses rekonsiliasi. Jika sebelumnya keamanan kawasan dikendalikan oleh aliansi seperti Quad (AS, Jepang, India, Australia) atau AUKUS (AS, Inggris, Australia), maka kehadiran SGS menawarkan model baru kerja sama tanpa aliansi yang resmi. Indonesia melalui SGS, mengimplementasikan format pelatihan terbuka yang tidak membatasi keikutsertaan berdasarkan blok kekuatan, melainkan berdasarkan kesamaan kepentingan untuk memperkuat stabilitas dan kemampuan pertahanan. Melalui cara ini, Indonesia membantu mengubah dinamika keamanan regional dari yang bersifat aliansi eksklusif menjadi keamanan berbasis kemitraan inklusif. Berbeda dengan pola aliansi eksklusif seperti AUKUS atau QUAD yang bersifat tertutup dan berorientasi pada kepentingan strategis tertentu, SGS justru merepresentasikan bentuk baru keamanan kooperatif yang lebih inklusif. Melalui pendekatan ini, Indonesia menegaskan perannya sebagai *bridge builder* di kawasan Indo-Pasifik, yaitu negara yang berperan menjembatani kepentingan antara kekuatan besar dan negara-negara menengah tanpa menciptakan polarisasi baru. Pandangan ini sejalan dengan Buzan dan Wæver (2003) dalam *Regional Security Complex Theory (RSCT)*, yang menekankan pentingnya keterhubungan (*interdependence*) dan komunikasi lintas negara sebagai kunci terciptanya stabilitas regional.

Dari sudut pandang strategis, keberadaan SGS juga memperkuat posisi Indonesia dalam struktur keamanan kawasan. Dengan peran aktif sebagai penyelenggara dan penggagas, Indonesia mendapatkan keuntungan strategis yang memperkuat posisinya dalam forum regional seperti ADMM-Plus, Shangri-La Dialogue, dan East Asia Summit. Kemampuan Indonesia dalam menarik partisipasi luas tanpa menimbulkan penolakan dari negara besar mencerminkan keberhasilan diplomasi pertahanan yang berlandaskan prinsip bebas-aktif. Dalam konteks RSCT, ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memposisikan diri bukan sebagai “penerus” dalam sistem keamanan regional, melainkan sebagai pembentuk agenda yang berkontribusi langsung terhadap pembentukan tatanan keamanan kawasan.

Akhirnya, SGS bisa dipahami sebagai cerminan dari strategi Indonesia dalam menangani kompleksitas keamanan di kawasan. Melalui penekanan pada kolaborasi multilateral, keterbukaan, dan dialog militer, Indonesia memperkuat legitimasi serta makna diplomasi pertahanannya. Dalam kerangka RSCT, tindakan ini tidak hanya menstabilkan relasi antarnegara di kawasan, tetapi juga mengurangi kemungkinan konflik yang berasal dari salah paham dan kecurigaan strategis. SGS mengungkapkan bahwa di tengah persaingan antara kekuatan-kekuatan besar, Indonesia dapat berfungsi sebagai penopang stabilitas — negara yang netral namun tetap berperan aktif dalam membangun keamanan kolektif Indo-Pasifik secara positif.

4. Kesimpulan

Super Garuda Shield (SGS) telah bertransformasi menjadi laboratorium diplomasi pertahanan Indonesia, di mana kerja sama militer dimaknai sebagai sarana *soft power* untuk memperkuat stabilitas kawasan, bukan sekadar demonstrasi kekuatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa SGS bukan hanya latihan militer internasional terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga manifestasi konkret dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Melalui SGS, Indonesia membuktikan bahwa diplomasi pertahanan dapat dilakukan secara kolaboratif dan inklusif tanpa harus terikat pada aliansi formal, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor strategis dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.

SGS 2023 menunjukkan bagaimana diplomasi pertahanan dapat berfungsi sebagai instrumen *soft power* yang memperkuat posisi negosiasi Indonesia di tengah persaingan Amerika dan Tiongkok. Melalui partisipasi 19 negara dari berbagai wilayah, Indonesia berhasil membangun lingkungan kolaborasi pertahanan yang terbuka, inklusif, dan tidak konfrontatif. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat berperan sebagai honest broker di kawasan Indo-Pasifik—sebuah negara yang mampu menjembatani kepentingan strategis berbagai pihak tanpa memihak. Keberhasilan ini membuktikan secara konkret bahwa prinsip bebas-aktif tetap relevan dalam konteks geopolitik modern yang semakin kompleks dan multipolar.

Dalam konteks teori, studi ini berperan dalam memperdalam pengetahuan mengenai pelaksanaan diplomasi pertahanan oleh negara menengah dalam bingkai Teori Kompleks Keamanan Regional (RSCT). SGS menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia bisa berperan penting dalam membentuk keamanan kawasan, bukan melalui kekuatan militer yang langsung (*hard power*), melainkan melalui kolaborasi militer yang berlandaskan kepercayaan, kemampuan beroperasi bersama, dan dialog strategis. Dengan demikian, SGS berfungsi sebagai contoh nyata diplomasi pertahanan yang mengedepankan kerja sama dan fokus pada stabilitas, bukan penguasaan.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap penguatan pemahaman tentang *defense diplomacy* dan *Regional Security Complex Theory (RSCT)*, dengan menunjukkan bahwa negara menengah dapat memanfaatkan diplomasi pertahanan sebagai mekanisme *soft power* untuk mengurangi ketegangan kawasan. Temuan ini juga memperluas penerapan RSCT dalam konteks Indo-Pasifik yang multipolar, di mana kerja sama militer multinasional berperan sebagai sarana keterhubungan keamanan antarnegara. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya institusionalisasi diplomasi pertahanan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga program seperti SGS tidak hanya menjadi latihan militer tahunan, tetapi juga bagian dari strategi diplomatik jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai *bridge builder* di kawasan Indo-Pasifik.

Penelitian ini secara praktis menegaskan urgensi keberlanjutan pelaksanaan SGS sebagai alat diplomasi pertahanan yang berkelanjutan. Keberhasilan SGS 2023 seharusnya dipandang bukan sebagai kejadian yang terpisah, melainkan sebagai elemen dari strategi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat jaringan pertahanan multilateral. Melalui konsistensi dalam latihan, Indonesia mampu mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan menengah yang berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas wilayah Indo-Pasifik. Selain itu, keberlanjutan SGS juga dapat digunakan untuk memperluas area kolaborasi non-tradisional seperti keamanan siber, pertahanan luar angkasa, dan penanggulangan bencana, yang semakin krusial dalam konteks keamanan masa kini.

Selanjutnya, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk Kementerian Pertahanan dan TNI guna memperkuat aspek diplomasi dalam setiap latihan militer internasional. Harus ada sistem yang menggabungkan hasil pelatihan seperti SGS ke dalam rencana strategis jangka panjang Indonesia, baik melalui penyusunan Defense Diplomacy Roadmap maupun kolaborasi akademis dan industri pertahanan. Dengan demikian, keuntungan SGS tidak hanya terfokus pada peningkatan kemampuan militer, tetapi juga membantu mencapai tujuan politik luar negeri: menjaga stabilitas regional dan memperluas pengaruh Indonesia sebagai aktor positif di Indo-Pasifik.

Studi ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai penstabil kekuatan menengah di wilayah ini. Keberhasilan pelaksanaan SGS menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola hubungan dengan banyak negara tanpa menciptakan ketegangan geopolitik. Jabatan ini dapat digunakan untuk menguatkan diplomasi pertahanan yang berlandaskan dialog dan kolaborasi multilateral, serta memperluas jaringan pengaruh Indonesia secara global. Dengan secara konsisten menjadi penyelenggara latihan multinasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang berpengaruh dalam merancang keamanan Indo-Pasifik yang mengutamakan inklusivitas dan kolaborasi.

Sebagai langkah penelitian selanjutnya, studi ini merekomendasikan analisis komparatif antara *Super Garuda Shield (SGS)* dan latihan multinasional lainnya seperti *Cobra Gold* di Thailand atau forum *ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM)*. Perbandingan ini diharapkan

dapat memperdalam pemahaman mengenai karakteristik unik diplomasi pertahanan Indonesia dibandingkan dengan praktik serupa di negara lain. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diplomasi pertahanan di kawasan Asia Tenggara, sekaligus merancang strategi optimal agar SGS dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap keamanan dan integrasi regional.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Made Panji Teguh Santoso selaku dosen pembimbing sekaligus penulis kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Singaperbangsa Karawang atas dukungan akademik yang diberikan. Selain itu, penulis turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan penelitian ini.

6. Referensi

ASEAN Secretariat. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)*. Jakarta: ASEAN. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/01/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific-FINAL-22062019.pdf>

Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press. <https://ir101.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/Buzan-Waever-2003-Regions-and-Powers-The-Structure-of-International-Security.pdf>

Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping defense diplomacy: New roles for military cooperation and assistance*. Oxford: Routledge / International Institute for Strategic Studies (IISS). [https://www.defence.lk/upload/ebooks/Reshaping%20Defence%20Diplomacy%20New%20Roles%20for%20Military%20Cooperation%20and%20Assistance%20\(%20PDFDrive.com%20\).pdf](https://www.defence.lk/upload/ebooks/Reshaping%20Defence%20Diplomacy%20New%20Roles%20for%20Military%20Cooperation%20and%20Assistance%20(%20PDFDrive.com%20).pdf)

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/510378/mod_resource/content/1/creswell.pdf

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. <https://methods.sagepub.com/book/mono/content-analysis-4e/toc#>

Laksmana, E. A. (2021). Indonesia's foreign policy and the US-China rivalry in the Indo-Pacific. *International Affairs*, 97(1), 1-17. <https://doi.org/10.1093/ia/jiaa229>

The Diplomat. (2023, August 31). *Indonesia, US Open Military Drills Amid South China Sea Tension*. Retrieved date October 13, 2025, from <https://thediplomat.com/2023/08/indonesia-us-open-military-drills-amid-south-china-sea-tension/>

The Jakarta Post. (2023, September 2). *Indonesia hosts largest military drills with US, allies as South China Sea tension grows*. Retrieved date October 13, 2025, from <https://www.thejakartapost.com/world/2023/09/02/indonesia-hosts-largest-military-drills-with-us-allies-as-south-china-sea-tension-grows.html>

US Indo-Pacific Command. (2022, August 03). *Super Garuda Shield 2022 Showcases Multinational Partnership and Joint Interoperability*. <https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/3115583/super-garuda-shield-2022-showcases-multinational-partnership-and-joint-interope/>

US Indo-Pacific Command. (2023, August 31). *Super Garuda Shield 2023 concludes in Indonesia*. <https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/3506949/super-garuda-shield-2023-concludes-in-indonesia/>

ANTARA News Jawa Timur. (2023, Agustus 22). *Kapal perang peserta Super Garuda Shield 2023 berkumpul di Surabaya*. <https://jatim.antaranews.com/berita/725922/kapal-perang-peserta-super-garuda-shield-2023-berkumpul-di-surabaya>

TNI Pusat Penerangan (PPID). (2023, Mei 22). *Super Garuda Shield 2023 Akan Diikuti Militer 22 Negara*. <https://ppid.tni.mil.id/view/32436504/super-garuda-shield-2023-akan-diikuti-militer-22-negara.html>